



**PERATURAN DESA DURUNGBANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DURUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA DURUNGABANJAR KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA DURUNGBANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DURUNGBANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
25. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Durungbanjar Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bumdesa Banjar Jaya Durungbanjar (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Durungbanjar Tahun 2026 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA DURUNGBANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.989.500.738,00
2. Belanja Desa	Rp	1.852.307.692,89
Surplus/Defisit	Rp	137.193.045,11
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.271.754,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	256.464.800,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(137.193.045,11)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Durungbanjar.

Ditetapkan di : Durungbanjar
Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : Durungbanjar
Pada tanggal : 29 Desember 2025



LEMBARAN DESA DURUNGBANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan H. Abd. Djalil Nomor 01 Desa Durungbanjar Kec. Candi
Kab. Sidoarjo 61271

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA DURUNGBANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat PJ Kepala Desa perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar
Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa setelah melalui pembahasan dalam acara Sidang
Badan Permasyarakatan Desa, maka Badan
Permasyarakatan Desa tidak keberatan untuk
menyetujui atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
25. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Durungbanjar Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bumdesa Banjar Jaya Durungbanjar (Lembaran Desa Durungbanjar

Tahun 2025 Nomor 6);

- 28. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Durungbanjar Tahun 2026 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 7);
- 29. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 10).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Desa Durungbanjar dengan Pemerintah Desa pada tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembahasan dan Penetapan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA DURUNGBANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	141.750.000,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.847.750.738,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.989.500.738,00	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.104.105.978,57	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	406.006.331,32	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	164.715.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	60.863.600,00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	116.616.783,00	
Jumlah Belanja	Rp	1.852.307.692,89	
Surplus/Defisit	Rp	137.193.045,11	

3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.271.754,89	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	256.464.800,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(137.193.045,11)	
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00	
Perhitungan Anggaran			

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durungbanjar
Pada tanggal : 29 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

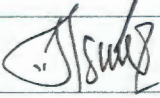
RIZA AHMADI THOHIR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan H. Abd. Djalil Nomor 01 Desa Durungbanjar Kec. Candi
Kab. Sidoarjo 61271

PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURUNGBANJAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah kami anggota Badan Permasyarakatan Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan ini menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIZA AHMADI THOHIR, S.E., M.M	Ketua BPD	
2	ISWAHYUNINGSIH	Wakil Ketua	
3	NUR MASDUQI	Sekretaris	
4	ACH. ZAINURI	Anggota	
5	KARTUDJI	Anggota	

Durungbanjar, 28 Desember 2024
KETUA BPD DURUNGBANJAR


RIZA AHMADI THOHIR, S.E., M.M

**BERITA ACARA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor: 900/024/438.7.2.24/2025

Sehubungan dengan nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Jam : 21.00 WIB
Tempat : Balai Desa Durungbanjar

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- 1. Ketua dan Anggota BPD Desa Durungbanjar
- 2. PJ Kepala Desa Durungbanjar
- 3. Sekretaris dan Perangkat Desa Durungbanjar

Daftar hadir terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Riza Ahmadi Thohir, S.E., M.M (Ketua BPD)
- b. Sekretaris/Notulen : Muslimin, S.AP (Sekretaris Desa)
- c. Narasumber : Rizqi Maulana Hadi, S.STP (PJ Kepala Desa)

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

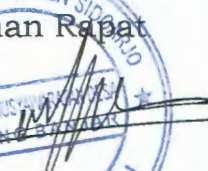
- 1. Pendapatan Desa sebesar : Rp. **1.989.500.738,00**
- 2. Belanja Desa sebesar : Rp. **1.852.307.692,89**
- 3. Pembiayaan Desa sebesar : Rp. **119.271.754,89**

Setelah dilakukan pembahasan materi tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	141.750.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.847.750.738,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.989.500.738,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.104.105.978,57
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	406.006.331,32
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	164.715.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	60.863.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	116.616.783,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.852.307.692,89</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>137.193.045,11</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.271.754,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	256.464.800,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(137.193.045,11)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Keputusan di atas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

RIZA AHMADI THOHIR, S.E., M.M

Sidoarjo, 29 Desember 2025
Notulen / Sekretaris

MUSLIMIN, S.AP

Mengetahui,
PJ. KEPALA DESA DURUNGBANJAR

RIZOI MAULANA HADI, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan H. Abd. Djalil Nomor 01 Desa Durungbanjar Kec. Candi
Kab. Sidoarjo 61271

DAFTAR HADIR

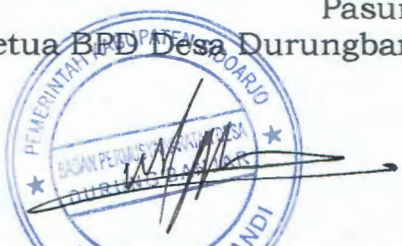
Hari : Senin
Tanggal : 29 Desember 2025
Tempat : Makoya, Pandaan - Pasuruan
Acara : Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Durungbanjar Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIZQI MAULANA HADI	Pj. Kepala Desa	1
2	MUSLIMIN	Sekretaris Desa	2
3	CITRA INDAH ASMARAH	Kaur Keuangan	3
4	ARIF LUKMAN SYAIFUL ISLAM	Kaur Perencanaan	4
5	KURNIA AWALIYAH	Kaur TU dan Umum	5
6	MUHAMAD AZIS	Kasi Pemerintahan	6
7	KHOIRUN UMAMI	Kasi Pelayanan	7
8	ABD. MUJIB	Kasi Kesra	8
9	UJANG AROFIK	Kasun Durungwetan	9
10	ABDUL FATAH	Kasun Banjarpoh	10
11	MOH. RIZKI ALIVIAN TO	Kasun Agal-Agil	11
12	RIZA AHMADI THOHIR	Ketua BPD	12
13	ISWAHYUNINGSIH	Wakil BPD	13
14	NUR MASDUQI	Sekretaris BPD	14
15	ACH. ZAINURI	Anggota BPD	15
16	KARTUDJI	Anggota BPD	16

Pasuruan, 29 Desember 2025

Ketua BPD Desa Durungbanjar

PJ Kepala Desa Durungbanjar


RIZA AHMADI THOHIR, S.E., M.M


RIZQI MAULANA HADI, S.STP



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan H. Abd. Djalil Nomor 01 Desa Durungbanjar Kec. Candi
Kab. Sidoarjo 61271

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 29 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Durungbanjar
Acara : Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Durungbanjar Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIZA AHMADI THOHIR	Ketua BPD	1
2	ISWAHYUNINGSIH	Wakil BPD	2
3	NUR MASDUQI	Sekretaris BPD	3
4	ACH. ZAINURI	Anggota BPD	4
5	KARTUDJI	Anggota BPD	5
6	RIZQI MAULANA HADI	Pj. Kepala Desa	6
7	MUSLIMIN	Sekretaris Desa	7
8	CITRA INDAH ASMARAH	Kaur Keuangan	8
9	ARIF LUKMAN SYAIFUL ISLAM	Kaur Perencanaan	9
10	KURNIA AWALIYAH	Kaur TU dan Umum	10
11	MUHAMAD AZIS	Kasi Pemerintahan	11
12	KHOIRUN UMAMI	Kasi Pelayanan	12
13	ABD. MUJIB	Kasi Kesra	13
14	UJANG AROFIK	Kasun Durungwetan	14
15	ABDUL FATAH	Kasun Banjarpoh	15
16	MOH. RIZKI ALIVIAN TO	Kasun Agal-Agil	16

Durungbanjar, 29 Desember 2025

Ketua BPD Desa Durungbanjar


RIZA AHMADI THOHIR, S.E., M.M

Durungbanjar, 29 Desember 2025

PJ Kepala Desa Durungbanjar


RIZQI MAULANA HADI, S.STP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	141.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.847.750.738,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.989.500.738,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	757.838.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	743.468.013,57	
5.3.	Belanja Modal	234.384.896,32	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.616.783,00	
	JUMLAH BELANJA	1.852.307.692,89	
	SURPLUS / (DEFISIT)	137.193.045,11	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.271.754,89	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.271.754,89	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	256.464.800,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	256.464.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(137.193.045,11)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DURUNGBANJAR, 29 Desember 2025
PJ. Kepala Desa
RIZQI MAULANA HADI, S.STP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	141.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.847.750.738,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.989.500.738,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.104.105.978,57	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	924.378.243,57	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	130.290.243,57	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.290.243,57	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.848.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.848.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	47.280.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	47.280.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	180.910.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	180.910.000,00	
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	10.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.174.455,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.306.685,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.306.685,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STN K;BPKB;dll)	6.867.770,00	ADD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.867.770,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.135.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.135.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.135.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.210.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.820.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.210.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.610.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.610.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12.570.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	90.208.280,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.988.280,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	3.988.280,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	7.500.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	8.000.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	70.720.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.720.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>406.006.331,32</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.790.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.790.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.790.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	215.265.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	21.020.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	117.290.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.290.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.140.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.540.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.600.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	23.470.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.470.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	5.345.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.033.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	63.437.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	63.437.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.596.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.596.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	52.452.831,32	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	52.452.831,32	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	52.452.831,32	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.465.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.465.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	13.455.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>164.715.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.570.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.620.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3.950.000,00	PBH
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	110.235.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	95.635.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.635.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	9.600.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.790.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.090.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.090.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	9.700.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.120.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.120.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.863.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.668.600,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	12.620.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.620.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	33.048.600,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	33.048.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.245.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.245.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.245.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.950.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	6.950.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>116.616.783,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.947.083,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.947.083,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.947.083,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.669.700,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.669.700,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.669.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.852.307.692,89	
		SURPLUS / (DEFISIT)	137.193.045,11	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	119.271.754,89	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	256.464.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(137.193.045,11)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DURUNGBANJAR, 29 Desember 2025

PJ. Kepala Desa



RIZQI MAULANA HADI, S.STP



**PERATURAN KEPALA DESA DURUNGBANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DURUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA DURUNGABANJAR KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA DURUNGBANJAR
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA DURUNGBANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DURUNGBANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 50);
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58);
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
 25. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Durungbanjar Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2018 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
 27. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bumdesa Banjar Jaya Durungbanjar (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 6);
 28. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Durungbanjar Tahun 2026 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 7);
 29. Peraturan Desa Durungbanjar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Durungbanjar Tahun 2025 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durungbanjar Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	141.750.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.847.750.738,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.989.500.738,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.104.105.978,57
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	406.006.331,32
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	164.715.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	60.863.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	116.616.783,00
Jumlah Belanja	Rp	1.852.307.692,89
Surplus/Defisit	Rp	137.193.045,11
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.271.754,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	256.464.800,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(137.193.045,11)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Durungbanjar
Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : Durungbanjar
Pada tanggal : 29 Desember 2025



BERITA DESA DURUNGBANJAR NOMOR 6 TAHUN 2025

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DURUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			141.750.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			141.750.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			141.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.847.750.738,00	
	4.2.1.	Dana Desa			893.388.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			893.388.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			493.161.685,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			493.161.685,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			461.201.053,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			461.201.053,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.989.500.738,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.104.105.978,57	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			924.378.243,57	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	OB	42.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			42.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			42.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			35.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			7.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	OB	424.800.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			424.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			424.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			354.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			70.800.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	130.290.243,57	ADD, DLL, PBH, PBK
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			130.290.243,57	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.100.243,57	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.263.053,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.220.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.300.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			4.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.263.798,51	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			502.563,06	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.050.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			829,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			74.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			55.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			17.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			14.350.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			15.840.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			7.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			3.240.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			5.280.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	5	OB	52.848.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			52.848.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			52.848.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			52.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan BPD			648.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	1.600.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.600.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			525.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			675.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Paket	10.800.000,00	PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.800.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			10.800.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Paket	23.850.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.850.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.063.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.823.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.01.08.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			500.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.787.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.787.000,00	
1.01.08.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			4.000.000,00	
1.01.90.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	1	OB	47.280.000,00	PAD, PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			47.280.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			47.280.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			3.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			40.800.000,00	
1.01.90.	5.1.1.94	Uang Makan			2.980.000,00	
1.01.91.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	10	OB	180.910.000,00	PAD, PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			180.910.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			180.910.000,00	
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			35.400.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			89.760.000,00	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			14.750.000,00	
1.01.91.	5.1.2.94	Uang Makan			41.000.000,00	
1.01.93.		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	1	Kali	10.000.000,00	PBH
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			10.000.000,00	
1.01.93.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			10.000.000,00	
1.01.93.	5.1.2.93	Purna Bakti Perangkat Desa			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			35.174.455,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	3.306.685,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			3.306.685,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.306.685,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.306.685,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Unit	25.000.000,00	DDS
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			25.000.000,00	
1.02.91.		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STNK;BPKB;dll)	1	Paket	6.867.770,00	ADD, PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.867.770,00	
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.630.000,00	
1.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.630.000,00	
1.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.237.770,00	
1.02.91.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			400.000,00	
1.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.737.770,00	
1.02.91.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.100.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			10.135.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Paket	10.135.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.135.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.985.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			360.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.850.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.600.000,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			300.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			44.210.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	kali	2.820.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.820.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.820.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.640.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			180.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6	Kali	12.210.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.210.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.660.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.300.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			360.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.250.000,00	
1.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			300.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	16.610.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.610.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.360.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.880.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			480.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.750.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.500.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			500.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1	Paket	12.570.000,00	PBH
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.570.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.070.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.750.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
1.04.10.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.200.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			90.208.280,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	Paket	3.988.280,00	PAD
1.05.01.	5.3.	Belanja Modal			3.988.280,00	
1.05.01.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			3.988.280,00	
1.05.01.	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah			3.988.280,00	
1.05.07.		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3	Unit	7.500.000,00	PBH
1.05.07.	5.3.	Belanja Modal			7.500.000,00	
1.05.07.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.500.000,00	
1.05.07.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			7.500.000,00	
1.05.90.		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	1	Paket	8.000.000,00	PAD
1.05.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
1.05.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.000.000,00	
1.05.90.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			8.000.000,00	
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	Paket	70.720.000,00	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.870.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.150.000,00	
1.05.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			720.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.850.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			9.850.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			45.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			45.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			406.006.331,32	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			30.790.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	28.790.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.790.000,00	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.590.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.750.000,00	
2.01.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa			22.200.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	Paket	2.000.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			215.265.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	21.020.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.020.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.620.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			4.000.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.02.01.	5.3.	Belanja Modal			14.000.000,00	
2.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			14.000.000,00	
2.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			14.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	117.290.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			117.290.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			106.170.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			104.950.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			420.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.320.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			10.320.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	42.140.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.540.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.640.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.700.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12.200.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			12.200.000,00	
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			13.600.000,00	
2.02.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			13.600.000,00	
2.02.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			13.600.000,00	
2.02.08.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	Paket	4.500.000,00	DDS
2.02.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
2.02.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.500.000,00	
2.02.08.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			4.500.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	Paket	1.500.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			1.500.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.500.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.500.000,00	
2.02.90.		Penyelenggaraan Senam Desa	46	Kali	23.470.000,00	PBH
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.470.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.020.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.250.000,00	
2.02.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
2.02.90.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.650.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.875.000,00	
2.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.575.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.575.000,00	
2.02.91.		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	1	Paket	5.345.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.345.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.245.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.125.000,00	
2.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.400.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
2.02.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.700.000,00	
2.02.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.700.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			84.033.500,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	138	meter	63.437.500,00	DDS
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			63.437.500,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			63.437.500,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			12.740.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			48.847.500,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			450.000,00	
2.03.10.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			500.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	12	Meter	20.596.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			20.596.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			20.596.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			8.450.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			11.146.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			52.452.831,32	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1	Unit	52.452.831,32	DDS
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			52.452.831,32	
2.04.15.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			52.452.831,32	
2.04.15.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			52.452.831,32	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			23.465.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1	Paket	23.465.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.010.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.06.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.810.000,00	
2.06.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.810.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			13.455.000,00	
2.06.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			13.455.000,00	
2.06.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			13.455.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			164.715.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			7.570.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1	Paket	3.620.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.620.000,00	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.620.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
3.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.01.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.06.		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	Paket	3.950.000,00	PBH
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.950.000,00	
3.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.950.000,00	
3.01.06.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.950.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			110.235.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Paket	5.000.000,00	DDS
3.02.01.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
3.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			5.000.000,00	
3.02.01.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			5.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	95.635.000,00	DDS, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			95.635.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			42.135.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			30.660.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			10.375.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / N			500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.250.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
3.02.03.	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Juri Lomba			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			44.250.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			42.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.250.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			5.000.000,00	
3.02.90.		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	2	OB	9.600.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.600.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.600.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.600.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			24.790.000,00	
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2	Paket	15.090.000,00	DDS
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.090.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.840.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.600.000,00	
3.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
3.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
3.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.500.000,00	
3.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.750.000,00	
3.03.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.750.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1	Paket	9.700.000,00	DDS
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
3.03.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
3.03.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
3.03.04.	5.3.	Belanja Modal			2.500.000,00	
3.03.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			2.500.000,00	
3.03.04.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			2.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			22.120.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	22.120.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.120.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.370.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.910.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			360.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.750.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.750.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			60.863.600,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			45.668.600,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20	Orang	12.620.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.620.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.620.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
4.02.05.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.000.000,00	
4.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
4.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
4.02.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60	Meter	33.048.600,00	DDS
4.02.06.	5.3.	Belanja Modal			33.048.600,00	
4.02.06.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			33.048.600,00	
4.02.06.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
4.02.06.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			18.325.000,00	
4.02.06.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			13.473.600,00	
4.02.06.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			8.245.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Paket	8.245.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.245.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.245.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.125.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			6.950.000,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1	Paket	6.950.000,00	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.950.000,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.450.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.330.000,00	
4.07.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
4.07.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.500.000,00	
4.07.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			116.616.783,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			6.947.083,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	6.947.083,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			6.947.083,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			6.947.083,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			6.947.083,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			1.669.700,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	1.669.700,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			1.669.700,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			1.669.700,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			1.669.700,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			108.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	30	KPM	108.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			108.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			108.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.852.307.692,89	
		SURPLUS DEFISIT			137.193.045,11	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			119.271.754,89	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			119.271.754,89	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			119.271.754,89	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			256.464.800,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			256.464.800,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			256.464.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			137.193.045,11	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	


 DURUNGBANJAR, 29 Desember 2021
 P.J. Kepala Desa
 RIZQI MAULANA HADI, S.STP